

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 telah selesai diadakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pilpres 2024 ini memilih pengganti dari Presiden Indonesia, yaitu bapak Joko Widodo (Jokowi), yang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Berdasarkan artikel berita *the conversation.com*, seluruh lembaga survei yang menyelenggarakan hitung cepat (*quick count*) dengan capaian suara masuk mencapai 100%, telah menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memenangkan hasil hitung cepat Pilpres dengan memperoleh suara sebesar 58% dan cukup jauh diatas pasangan Anies-Imin yang memperoleh suara sebesar 25% dan pasangan Ganjar-Mahfud yang memperoleh suara sebesar 16%.¹

Yohanes Sulaiman, dosen dari Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, mengatakan bahwa perjalanan Prabowo menuju jabatan Presiden Indonesia dapat dicapai karena koalisi besar dan juga didampingi oleh putra sulung Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang mampu mengangkat

¹ Nurul Fitri Ramadahani, "Jalan Panjang Prabowo Menuju Kekuasaan: Dari Citra Pelanggar HAM hingga Jadi Anak Emas Jokowi", 16 Februari 2024", <https://theconversation.com/jalan-panjang-prabowo-menuju-kekuasaan-dari-citra-pelanggar-ham-hingga-jadi-anak-emas-jokowi-222274>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 14.00 WIB).

perolehan suara Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024.² Masyarakat meyakini bahwa pasangan Prabowo-Gibran adalah calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh Jokowi untuk melanjutkan program-program Jokowi. Dukungan Jokowi kepada Prabowo-Gibran menunjukkan hasil suara elektoral yang signifikan dan menguntungkan bagi pasangan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada tingginya dukungan masyarakat terhadap Presiden Jokowi, di mana selama dua periode menjabat sebagai Presiden Indonesia, Jokowi mendapatkan kepuasan publik yang sangat tinggi mencapai 80%.³ Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Lembaga Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 81,9% (pada bulan Juli 2023) dan 79,2% (pada bulan Juni 2023).⁴

Meski demikian, proses pemilihan Gibran sebagai Cawapres oleh Prabowo dan partai koalisinya menuai kontroversi besar menjelang Pilpres 2024. Beberapa pihak menganggap Jokowi dapat mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), karena adik iparnya, Anwar Usman, yang saat itu menjabat sebagai ketua hakim MK untuk memutuskan batas usia Capres-Cawapres dalam UU Pemilu.⁵ Putusan MK bernomor 90/puu-xxi/2023 mengatur bahwa seseorang yang pernah

² *Ibid.*

³ Adhyasta Dirgantara, dkk, “Survei LSI: 82 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi, Capaian Tertinggi”, 03 Mei 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/03/23464031/survei-lsi-82-persen-masyarakat-puas-dengan-kinerja-jokowi-capaian-tertinggi>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 13.58 WIB).

⁴ *BBC.com*, “Jokowi Dulu dan Sekarang, Antara ‘Harapan dan Kenyataan’”, 10 November 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cprxqvw7lido>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 14.10 WIB).

⁵ Andika Dwi, “Dirty Vote Bongkar Sederet Kejanggalan Putusan MK yang Loloskan Gibran Jadi Cawapres”, 12 Februari 2024, <https://metro.tempo.co/read/1832551/dirty-vote-bongkar-sederet-kejanggalan-putusan-mk-yang-loloskan-gibran-jadi-cawapres>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 14.04 WIB).

atau sedang menjabat dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah, meski belum berusia 40 tahun.⁶ Bivitri Susanti, seorang pakar hukum tata negara menyebutkan bahwa putusan MK tersebut dianggap memiliki banyak kejanggalan dari berbagai sisi dan beliau juga menyebutkan bahwa putusan MK menjadi puncak dari rangkaian cerita tentang kecurangan Pemilu melalui film dokumenter berjudul “*Dirty Vote*”.⁷

Terdapat kebijakan pemerintah yang juga menuai kontroversi, yaitu soal bantuan sosial (bansos). Hal itu disebabkan Presiden Jokowi Kembali mengadakan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 2024 dan memakan anggaran cukup besar, yaitu sebesar Rp. 11,2 triliun dan akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos tersebut sebanyak Rp. 600 ribu.⁸ Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan bahwa pemberian bansos tersebut sudah ada dalam APBN dan sudah disetujui oleh DPR dengan anggaran sebesar Rp. 496 triliun sehingga jumlah tersebut bertambah sekitar Rp. 20 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 476 triliun.⁹ Akan tetapi, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa anggaran tersebut ditujukan untuk perlindungan sosial (perlinsos) dan

⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Minimal Bagi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 13.52 WIB).

⁷ Andika Dwi, *Op. Cit.*

⁸ Tasya Natalia, “Bansos Jadi Sorotan Menjelang Pilpres 2024, Begini Datanya!”, 04 Februari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240204172607-128-511564/bansos-jadi-sorotan-menjelang-pilpres-2024-begini-datanya>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 13.46 WIB).

⁹Tim Redaksi CNBC Indonesia, “Jokowi Bagi-Bagi Bansos Jelang Pemilu, Sri Mulyani Bilang Gini”, 04 Februari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240204074757-4-511490/jokowi-bagi-bagi-bansos-jelang-pemilu-sri-mulyani-bilang-gini>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 13.48 WIB).

bukan hanya bansos.¹⁰ Beliau menjelaskan bahwa perlinsos ini terdiri dari bansos serta beragam subsidi seperti subsidi bahan bakar minyak dan listrik, subsidi pupuk, bantuan iuran JKN dan subsidi LPG serta subsidi untuk bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah ter skema di dalam anggaran sebesar Rp. 496 triliun tersebut.¹¹ Muhadjir juga menjelaskan bansos pada tahun 2024 ini menelan anggaran sebesar Rp. 97 triliun dan anggaran bansos dapat bertambah dari anggaran-anggaran lembaga dan kementerian lain seperti anggaran sektor ketahanan pangan.¹² Berdasarkan buku II “Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024”, ada alokasi anggaran perlinsos sebesar Rp. 156.101 miliar untuk Kementerian sosial, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, dan Kemenag, kemudian dana sebesar Rp. 330.000 miliar untuk penyaluran subsidi BBM, LPG, dan bunga KUR, kemudian dana sebesar Rp. 10. 650 miliar untuk penyaluran BLT Desa bagi 2,96 juta KPM.¹³

Menurut pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, bansos tersebut digunakan sebagai alat politik.¹⁴ Bivitri juga menyebutkan bahwa dalam ilmu

¹⁰ Ardito Ramadhan, dkk, "Menko PMK Sebut Anggaran Rp 496 Triliun Bukan untuk Bantuan Sosial, tapi Perlindungan Sosial", 22 Februari 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/22/18261011/menko-pmk-sebut-anggaran-rp-496-triliun-bukan-untuk-bantuan-sosial-tapi>, (diakses pada 02 April 2024, pukul 23.16 WIB).

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Buku II Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024”, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/d8cecd11-302f-4717-bd9f-d62e47d94485>, (diakses pada 02 April 2024, pukul 23. 45 WIB).

¹⁴ Yolanda Agne, “Disebut Dalam Film Dirty Vote, Ini Penjelasan Politik Gentong Babi Ala Jokowi”, 12 Februari 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1832588/disebut-dalam-film-dirty-vote-ini-penjelasan-politik-gentong-babi-ala-jokowi>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 14.30 WIB).

politik ada mekanisme politik, yang bernama politik gentong babi, di mana dalam konteks politik di Indonesia saat ini politisi memakai uang negara sebagai salah satu alat untuk mempengaruhi masyarakat agar tergantung pada dirinya sehingga dia dapat terpilih kembali dan salah satu bentuknya adalah bantuan sosial (bansos), yang digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi seolah-olah bantuan berasal dari uang rakyat dan tersalurkan bantuan atas dasar kebaikan politisi tersebut.¹⁵ Bivitri juga berpandangan bahwa cara-cara tersebut dilakukan Jokowi, bukan untuk memilih dirinya, melainkan memilih penerusnya yang akan melanjutkan program-programnya dalam penjelasannya di film dokumenter *Dirty Vote*.¹⁶

Langkah lain yang juga dapat diamati sebagai salah satu langkah Jokowi untuk mengamankan kekuasaan dan program-programnya adalah melalui pengangkatan 271 Penjabat (Pj) Kepala Daerah di seluruh Indonesia, di mana mereka dipilih oleh Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjelang Pemilu 2024.¹⁷ Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 (UU Pilkada) Pasal 201 ayat (7) menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024, Pasal 201 ayat (8) menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dadang I. K. Mujiono, "2024 Ganti Presiden, Pakar Ungkap Strategi Jokowi Untuk Tetap Mengamankan IKN" 09 Oktober 2022, <https://theconversation.com/2024-ganti-presiden-pakar-ungkap-strategi-jokowi-untuk-tetap-mengamankan-ikn-187803>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 14.35 WIB).

Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, dan Pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5), diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.¹⁸

Mekanisme baru penunjukkan Penjabat Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap UU Pilkada, yang menyatakan bahwa Menteri dan DPRD Provinsi melalui Ketua DPRD Provinsi mengusulkan Penjabat Gubernur, dan Penjabat Gubernur ditetapkan oleh Keputusan Presiden.¹⁹ Selanjutnya, Menteri, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Ketua DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan Penjabat Bupati dan Walikota serta Keputusan Menteri menetapkan Penjabat Bupati dan Walikota.²⁰

¹⁸ Sri Pujiarti, “Sejumlah Kepala Daerah Persoalkan Kompleksitas Pilkada Serentak”, 07 Februari 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20005&menu=2>, (diakses pada 26 April 2024, pukul 20.10 WIB).

¹⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Walikota”, 05 April 2023, <https://peraturan.go.id/files/permendagri-no-4-tahun-2023.pdf>, (diakses pada 25 April 2024, pukul 16.05 WIB).

²⁰ *Ibid.*

UU Pilkada tersebut menyebabkan berbagai persoalan seperti mekanisme penunjukkan yang tidak diatur, masa jabatan Kepala Daerah yang terpotong untuk Kepala Daerah dengan masa jabatan 2020-2025 dan Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 2021 serta bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22E yang menyatakan masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun.²¹ Ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1), yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.²² Ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) tidak akan bertentangan, apabila tidak berlaku bagi seluruh daerah yang melakukan pemungutan suara tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 174 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016, penunjukkan Pejabat Kepala Daerah hanya ditentukan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri juga menjadi persoalan, karena ketentuan tersebut memberikan legitimasi khusus kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk mengatur pemerintah daerah.²³ Kewenangan dari Pejabat Kepala Daerah juga terbatas dan besarnya kontrol dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat. Hal itu didasarkan pada Pasal 132A ayat (2) PP No. 49 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa larangan-larangan membuat kebijakan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya, yang tertuang dalam Pasal 132A ayat (1) tersebut dapat dikecualikan, setelah mendapat

²¹ Utami Argawati, "Pilkada Serentak 2024 Akibatkan Masa Jabatan Kepala Daerah Berkurang", 13 Oktober 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18612>, (diakses pada 26 April 2024, pukul 20.20 WIB).

²² *Ibid.*

²³ Dadan Ramdani, *Problematika Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*, Tesis, Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 4.

persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.²⁴ Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dan pengawasan kebijakan strategis daerah oleh politisi nasional pusat dapat menyebabkan sentralisasi pengaturan daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini dapat melanggar prinsip otonomi daerah dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.²⁵

Proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah menimbulkan masalah tambahan. Masa jabatan mereka, yang berkisar antara 2 dan 2,5 tahun, dapat mencapai setengah dari masa jabatan Kepala Daerah terpilih.²⁶ Faktanya, muncul persoalan di beberapa daerah akibat sentralisasi pada Presiden dan Menteri Dalam Negeri dalam penunjukan Penjabat Kepala Daerah, khususnya pada penunjukan Penjabat Bupati Kabupaten Muna Barat dan Buton Selatan, di mana Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengusulkan tiga nama calon Penjabat Bupati untuk kedua daerah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tetapi Mendagri menunjuk calon lain sebagai Penjabat Bupati di luar usulan tersebut.²⁷ Mengutip artikel berita *the conversation.com*, Kepala Daerah hasil pemilihan politisi nasional dapat menggerakkan dan mempengaruhi massa untuk mendukung program nasional, khususnya untuk memilih kandidat Capres-Cawapres yang didukung oleh orang yang berkuasa di pusat pemerintahan Indonesia, yaitu

²⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Bdk. Laode Harjudin, dkk, "Menggugat Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat", *Journal Publicho*, Vol. 5, No. 4, 2022, hlm. 1363.

²⁷ *Ibid.*

Presiden Jokowi.²⁸ Hal ini dapat memperbesar peluang terpilihnya kandidat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 demi menjamin keberlanjutan program kerja.

Faktor Jokowi memberikan dampak elektoral yang positif bagi Prabowo-Gibran dan menjadi seorang tokoh kunci dalam Pilpres 2024.²⁹ Awal langkah Jokowi menjadi seorang tokoh kunci dalam Pilpres 2024 terjadi ketika Pilpres 2014. Karena beliau dianggap mempengaruhi perolehan suara partai politik pendukungnya, seperti PDIP. Hal tersebut berbeda dengan Prabowo yang didukung oleh Koalisi Merah Putih dengan 63 % kursi parlemen.³⁰ Pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Hal ini memecahkan mitos bahwa koalisi politik yang besar selalu menang.³¹

Direktur eksekutif *Indonesian Presidential Studies* (IPS), Nyarwi Ahmad mengatakan Jokowi sebagai “sosok populis dan menjadi harapan masyarakat.”³² Pemerintahan pertama Jokowi-Jusuf Kalla berjalan semakin kuat dan stabil karena mereka merangkul partai politik yang sebelumnya berseberangan, seperti Golkar dan PPP. Hal ini berlanjut selama periode keduanya menjabat sebagai Presiden Indonesia, di mana pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh suara sebesar

²⁸ Dadang I. K. Mujiono, “2024 Ganti Presiden, Pakar Ungkap Strategi Jokowi Untuk Tetap Mengamankan IKN” 09 Oktober 2022, <https://theconversation.com/2024-ganti-presiden-pakar-ungkap-strategi-jokowi-untuk-tetap-mengamankan-ikn-187803>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 14.35 WIB).

²⁹ Yohanes Sulaiman, “Kemenangan Prabowo: Efek Jokowi dan Ujian Demokrasi Indonesia”, 15 Februari 2024, <https://theconversation.com/kemenangan-prabowo-efek-jokowi-dan-ujian-demokrasi-indonesia-223603>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 14.40 WIB).

³⁰ *BBC.com*, “Jokowi Dulu dan Sekarang, Antara ‘Harapan dan Kenyataan’”, 10 November 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cprxqvwp7ldo>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 14.10 WIB).

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

55,5%, sementara Prabowo-Sandi memperoleh suara sebesar 44,5%. Selain itu, Jokowi didukung oleh koalisi yang semakin kuat yang menguasai kursi parlemen sebesar 60,69%.³³ Dominasi tersebut semakin kuat dengan Jokowi merangkul rivalnya Ketika Pilpres 2014 dan 2019, yaitu Prabowo untuk masuk dalam koalisi pemerintah, karena ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan, yang juga otomatis memasukan Partai Gerindra dan juga menggandeng partai politik PAN dengan menunjuk ketua PAN, yaitu Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan. Maka, koalisi pemerintah menjadi koalisi yang besar dengan suara parlemen sebesar 80%.³⁴

Fenomena ini menunjukkan dengan jelas upaya Presiden Jokowi untuk mengakomodasi dan mengkonsolidasikan kekuatan politik di Indonesia untuk mendukung rencana dan menghindari ancaman sosial hingga pemilihan Presiden 2024. Selain itu, Jokowi berhasil mendorong beberapa anggota keluarganya untuk berpartisipasi dalam politik di Indonesia selama masa jabatan presidennya yang kedua, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mulai dari anak pertama Presiden Jokowi, Gibran, yang menjadi Walikota Solo selama dua tahun dan sekarang menjadi Cawapres; dan menantunya, Bobby Nasution menjadi Walikota Medan, dan anak bungsunya, Kaesang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selang tiga hari setelah memperoleh kartu tanda anggota (KTA) PSI.

³³ *Ibid.*

³⁴ *BBC.com*, “Jokowi Dulu dan Sekarang, Antara ‘Harapan dan Kenyataan’”, 10 November 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cprxqvw7ldo>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 14.10 WIB).

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terkesan mengabaikan fenomena kontroversi tersebut dan hanya membahasnya di antara orang-orang kelas menengah atas. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yaitu Aisah Putri Budiarti yang mengatakan bahwa isu pemerintahan yang kontroversial tidak berefek langsung ke rakyat dan dikuatkan dengan kepuasan publik masih konsisten selalu bagus.³⁵ Selain itu, Direktur eksekutif *Indonesian Presidential Studies* (IPS) Nyarwi Ahmad juga menguatkan pandangan tersebut, yang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi titik tolak kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, karena Jokowi menggunakan wajah populisme.³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, populisme merupakan suatu konsep yang mempertahankan hak, kearifan, dan kepentingan rakyat kecil³⁷

Fenomena-fenomena terhadap Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024 memperlihatkan kekuatan wacana yang dapat menggiring dan memiliki pengaruh kontrol terhadap tindakan masyarakat dalam menentukan pilihan Capres-Cawapres 2024. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa wacana adalah kumpulan pernyataan yang dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam jejaring sosial.³⁸ Dalam suatu kondisi tertentu, wacana dapat diucapkan, yang juga mengatur siapa yang dapat berbicara, kapan,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ KBBI Kemedikbud.go.id, "Populisme", 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Populisme>, (diakses pada 22 Februari 2024, pukul 14.50 WIB).

³⁸ Bdk. Michel Foucault, *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*, (dari judul asli *Histoire de la sexualite I: La Volonte de savoir*), diterjemahkan oleh Robert Hurley New York: Pantheon Books, 1978, hlm. 101.

dan di mana mereka dapat mengucapkannya.³⁹ Wacana adalah alat sekaligus cara menyampaikan pesan kepada seseorang.⁴⁰ Media berita, dan media sosial merupakan bentuk wacana penyebaran informasi yang memiliki efek kontrol yang efektif terhadap masyarakat daripada hanya perintah dari suatu otoritas.⁴¹ Di Indonesia, gejala tersebut tampak dalam citra Jokowi sebagai Presiden yang populis sehingga memperoleh kepuasan publik yang tinggi. Citra Jokowi telah disebarkan dengan sangat baik berkat dukungan dari berita dan media sosial yang efektif, yang mendorong masyarakat untuk mendukungnya dan menjadikan Jokowi sebagai tokoh dengan memberikan pengaruh kepada masyarakat. Wacana ini tidak hanya muncul di media, tetapi juga dalam pidato politik, aturan, dan keputusan yang dibuat. Karena wacana terdiri dari kata-kata yang digunakan dalam berbagai bentuk dan penalaran yang dilakukan manusia setiap hari.⁴² Sebagai contohnya adalah regulasi atau aturan-aturan tersebut dibuat untuk dapat memobilisasi massa dengan mengedepankan soal kepentingan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

Penjelasan fenomena-fenomena dunia politik Indonesia pada tahun 2024 juga memperlihatkan bahwa adanya kaitan antara wacana dengan kekuasaan, di mana wacana yang terbentuk dalam kebijakan atau peraturan, media berita, dan media sosial menjadi pertarungan wacana dalam kontestasi politik untuk

³⁹ Bdk Chris Barker, *Kamus Kajian Budaya*, Yogyakarta: Kanisius, 2014, hlm.79.

⁴⁰ Bdk. Agutinus Wisnu Dewantara, "Politik Menurut Michel Foucault Dalam 'The Archaeology of Knowledge' Dan Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik STKIP Widya Yuwana*, Vol. 15, Tahun ke-8, 2016, hlm.19.

⁴¹ Untara Simon, "Memahami Pergeseran Paradigma Kekuasaan Berdasarkan Gagasan Foucault tentang Kuasa dalam Discipline and Punish", *Jurnal RESPONS*, Vol. 23, No. 02, 2018, hlm. 207.

⁴² Bdk. Agutinus Wisnu Dewantara, *Op. Cit.*

membangun citra serta menjadi serangkaian permainan dalam rangka memobilisasi massa demi meraih suara terbanyak. Oleh karena itu, penulis hendak menjelaskan dan menunjukkan mekanisme yang dapat digunakan untuk mengontrol tindakan manusia dengan menginjeksikan pengetahuan.

Hal tersebut dilakukan oleh media informasi massa, yang memberikan informasi bahwa Presiden Jokowi melalui langkah-langkahnya dapat mengkonsolidasikan kekuatan politik dari pendukungnya maupun dari lawan politiknya yang akhirnya juga ikut bergabung untuk mendukung agenda-agendanya serta kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan rakyat kecil seperti bantuan sosial (bansos) demi menjamin keberlangsungan hidup rakyat. Upaya kontrol tersebut dilakukan dalam koridornya sebagai Presiden yang dapat menginjeksikan pengetahuan dalam bentuk menyuntikkan informasi melalui media teknologi dan juga regulasi terhadap masyarakat, di mana Presiden Jokowi mengoperasikannya dalam kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusannya yang diperlihatkan melalui wacana terhadap masyarakat dan juga diperlihatkan menjamin kesejahteraan rakyat kecil ini ternyata terdapat suatu kontrol untuk mendukung agenda-agendanya.

Mekanisme kekuasaan tidak hanya terdiri dari represi, tetapi juga dapat melalui wacana yang efektif dan peraturan yang dibuat untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berjalan dalam kehidupan masyarakat. Model-model kontrol dalam wacana tersebut selaras dengan pemikiran seorang filsuf Prancis, bernama Michel Foucault yang menjelaskan hakikat kekuasaan/pengetahuan dalam model

pembentukannya dan mekanisme-mekanisme yang beroperasi dalam masyarakat melalui wacana sebagai sarana injeksi pengetahuan sehingga kekuasaan hadir dalam bentuk kontrol tanpa paksaan dan juga kekuasaan kemudian dipahami bukan sebagai menentukan hidup mati demi kehidupan pemimpin, tetapi menjadi hak untuk mempertahankan hidup suatu masyarakat.⁴³

Prinsip utama Foucault untuk mekanisme hubungan kekuasaan dan pengetahuan adalah konsep masyarakat yang "taat", yang memungkinkan pembentukan individu yang "taat" tanpa menggunakan kekerasan.⁴⁴ Kekuasaan itu dapat dipahami memberi struktur kegiatan, tidak bersifat represif, dan produktif. Sisi produktif dari kekuasaan adalah menghasilkan masyarakat dan individu-individu, yang tindakannya sesuai dengan pengetahuan yang diinjeksikan melalui wacana.⁴⁵ Fokus Foucault adalah pada mekanisme dan strategi kekuasaan, dan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan yang kemudian berdampak pada bagaimana sesuatu diterima menjadi kebenaran.⁴⁶ Hal itu dikuatkan dengan pandangannya bahwa hubungan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari hubungan penyebaran pengetahuan.⁴⁷

⁴³ Bdk. Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hlm. 10.

⁴⁴ Bdk., Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, (dari judul asli *Surveiller et punir: Naissance de la prison*), diterjemahkan oleh Alan Sheridan, New York: Vintage Books, 1977, hlm. 149.

⁴⁵ Bdk. Haryatmoko, *Op.Cit*, hlm 15.

⁴⁶ Bdk. Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 1, No.1, 2021, hlm. 5.

⁴⁷ Bdk. Haryatmoko, *Op.Cit*, hlm 12.

Menurut pandangan ilmu politik, kekuasaan dapat dicapai, dimiliki, dan diwariskan.⁴⁸ Akan tetapi, gagasan tentang kekuasaan tersebut mengalami pergeseran paradigma di era kontemporer ini, di mana kekuasaan sebagai kontrol terhadap tindakan dimainkan dalam wacana.⁴⁹ Menurut Foucault, kekuasaan berasal dari situasi strategis daripada hak penguasa.⁵⁰ Oleh karena itu, kekuasaan adalah suatu keadaan strategis yang kompleks dalam masyarakat dengan mekanisme tertentu. Hal ini diwujudkan melalui sistem hukum dan politik yang mempertahankan kekuasaan dan menjamin kepatuhan, sehingga karakteristik negatif kekuasaan, termasuk kekerasan, tidak lagi dipersoalkan. Inilah metode kekuasaan untuk mengendalikan masyarakat yang berbeda. Kekuasaan ini menghasilkan fakta yang dipercaya sebagai suatu kebenaran.⁵¹

Strategi kontrol ditunjukkan oleh Foucault dalam narasinya tentang proses penghukuman dan terbentuknya penjara dalam karyanya yang berjudul *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*.⁵² Dalam karya tersebut, negara dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara melakukan apa yang harus dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu kehidupan bersama, yaitu menghukum mereka dengan mengatur waktu mereka di penjara untuk

⁴⁸ Bdk. Mangihut Siregar *Op.Cit*, hlm 3.

⁴⁹ Utara Simon, "Memahami Pergeseran Paradigma Kekuasaan Berdasarkan Gagasan Foucault tentang Kuasa dalam *Discipline and Punish*", *Jurnal RESPONS*, Vol. 23, No. 02, 2018, hlm. 208.

⁵⁰ Bdk. Haryatmoko, *Op.Cit*, hlm 15.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² Bdk., Michel Foucault, *Op.Cit*, hlm. 104-131.

menciptakan keamanan, kepuasan, dan kenyamanan.⁵³ Penjara melakukan dua fungsi kekuasaan, yaitu pendidikan dan mengontrol individu.⁵⁴

Prinsip utamanya adalah injeksi pengetahuan terhadap individu-individu, yang mampu membentuk setiap orang untuk dapat diubah tingkah lakunya. Oleh karena itu, pengontrolan terhadap tindakan menghasilkan perubahan tindakan dijalankan bukan melalui kekerasan secara fisik, tetapi lebih kepada efeknya dari injeksi pengetahuan. Sistem ini disebut sistem panoptik, yang berbentuk pengawasan tersembunyi dan akibat-akibatnya dirasakan untuk membentuk masyarakat disipliner, di mana salah satu tujuannya dalam segi politik adalah upaya mengontrol secara tidak kelihatan, melalui penyuntikkan informasi.⁵⁵

Pada era kontemporer, kekuasaan dilakukan dalam bentuk manajemen, di mana pengetahuan tidak dapat diabaikan, yang diperlihatkan dalam jejak pendapat dan keputusan-keputusan elite politik sehingga pengetahuan dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan gagasan Michel Foucault, seseorang dapat melihat lebih kritis bahwa injeksi pengetahuan dapat digunakan dengan sangat mudah melalui wacana berupa regulasi, media berita, dan media sosial. Menurut Foucault, strategi kekuasaan melekat pada kehendak untuk mengetahui, yang melalui wacana, dan ilmu pengetahuan yang dibangun dalam wacana. Bahasa yang digunakan dalam wacana menjadi mekanisme yang memungkinkan kekuasaan untuk mengambil bentuk pengetahuan.⁵⁶ Karena

⁵³ *Ibid.*, hlm. 3-7.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 112.

⁵⁵ Bdk. Haryatmoko, *Op.Cit*, hlm 17.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 17.

strategi kekuasaan berada di tingkat distribusi wacana, di mana pengetahuan didistribusikan untuk mengendalikan tindakan individu yang menerimanya.

Penjelasan di atas memperlihatkan politik sebagai strategi kekuasaan. Mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menunjukkan hal yang serupa dengan wacana-wacana melalui regulasi guna menyuntikkan informasi yang dapat menjadi pengetahuan, berkembang menjadi wacana, dan terus berkembang pada pertimbangan tindakan yang terkontrol kepada masyarakat. Opini ahli dalam film *Dirty Vote* maupun dalam media pers, regulasi pemilihan Penjabat Kepala Daerah, bantuan sosial, citra sebagai seorang yang populis, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan informasi merangkul lawan-lawan politik pada Pilpres tahun 2014 serta Pilpres 2019 memperlihatkan upaya kontrol-kontrol dalam wacana yang diinjeksikan dengan cara yang strategis. Maka, bagaimana wacana itu disebarkan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai kontrol terhadap tindakan masyarakat?

Cara strategis tersebut dijalankan berdasarkan media informasi dan regulasi yang dapat menormalisasi tindakan-tindakan tersebut sebagai suatu kebenaran dan tidak perlu dikritisi. Karena masyarakat terus-menerus diberikan informasi-informasi sehingga terjadi pengarah wacana. Selain itu, wacana pun juga turut mendukung upaya kontrol tersebut agar mencapai justifikasi kebenaran sehingga apa yang dilakukan oleh politisi seakan-akan dinormalkan atau dibiarkan oleh masyarakat Indonesia demi kebaikan negara. Permainan politik dalam wacana dipakai sebagai salah satu bentuk kontrol yang tidak terlihat terhadap

masyarakat. Bagi Foucault, jaminan sosial dan kebijakan-kebijakan penguasa juga dapat menjadi inti dari politik untuk mengontrol melalui teknik normalisasi untuk mengutamakan kelangsungan hidup. Hal tersebut memperlihatkan bahwa, di mana terdapat struktur maupun regulasi, di situ kuasa bekerja sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan agar dapat diyakini sebagai kebenaran. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengangkat karya tulis dengan judul **POLITIK SEBAGAI STRATEGI KEKUASAAN MENURUT PEMIKIRAN MICHEL FOUCAULT**. Penulis hendak mendalami dan menguraikan gagasan strategi kekuasaan menurut Michel Foucault untuk memberikan suatu penjelasan akar gagasan yang membangun realitas politik serta memberikan suatu penilaian terhadap pemikiran politik Indonesia di era kontemporer ini agar masyarakat dapat semakin memahami pemikiran di balik upaya-upaya politisi dalam menggunakan wacana informasi dan regulasi untuk menginjeksikan pengetahuan sehingga dapat mengontrol tindakan masyarakat demi kepentingannya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis memperdalam gagasan politik sebagai sarana strategi kekuasaan menurut pemikiran Michel Foucault. Untuk memperdalam gagasan tersebut, penulis mengajukan pertanyaan:

1. Apa itu gagasan politik sebagai strategi kekuasaan menurut pemikiran Michel Foucault?

1.3. Tujuan Penelitian

Skripsi yang berjudul “Politik Sebagai Strategi Kekuasaan Menurut Pemikiran Michel Foucault” ditulis dengan tiga tujuan:

1. Untuk semakin memahami dan memperdalam gagasan Michel Foucault tentang politik sebagai strategi kekuasaan, yang menjadi salah satu pemikiran dari konsekuensi persoalan mendasar terhadap realitas politik.
2. Untuk memberikan penjelasan bahwa strategi kekuasaan dalam pemikiran Foucault masih sangat relevan hingga saat ini, khususnya dalam politik Indonesia sehingga penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memperkaya dan memperdalam wawasan kita mengenai gagasan politik sebagai strategi kekuasaan agar kita semakin memahami dan mengetahui bentuk-bentuk mekanisme kontrol tidak terlihat di dalam masyarakat di dalam permainan wacana.
3. Untuk memenuhi persyaratan program studi strata satu (S1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Sumber Data

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif selama proses pembuatan skripsi ini. Penelitian jenis ini adalah jenis penelitian historis-faktual tentang tokoh. Jenis penelitian ini memiliki objek materi, yaitu gagasan Michel Foucault tentang politik sebagai strategi kekuasaan. Filsafat politik adalah objek

formal dari penelitian ini. Bahasan filsafat politik terhadap realitas politik adalah menguraikan akar gagasan, memahami, dan memberikan penilaian terhadap gagasan yang membangun realitas politik sehingga filsafat politik dapat dikatakan sebagai abstraksi terhadap realitas politik yang terjadi. Pemikiran politik dari seorang tokoh dilihat sebagai salah satu konsekuensi dari persoalan mendasar dari realitas politik. Jenis penelitian ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang gagasan politik sebagai strategi kekuasaan menurut Michel Foucault. Topik gagasan politik sebagai strategi kekuasaan didapatkan penulis melalui dua sumber pustaka utama, yaitu buku yang berjudul *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* karya Michel Foucault pada tahun 1975 dengan judul aslinya adalah *Surveiller et Punir: Naissance de la Prison* kemudian diterjemahkan oleh Alan Sheridan dalam bahasa Inggris pada tahun 1977 dan dicetak oleh Vintage Books.⁵⁷ Penulis juga menggunakan buku yang berjudul *The History of Sexuality Volume I: An Introduction* dengan judul aslinya adalah *Historie de la sexualite I: La Volonte de savoir* pada tahun 1976 dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Robert Hurley pada tahun 1978 dengan penerbit dari Pantheon Books.

Sumber pustaka pendukung sumber utama yang digunakan oleh penulis adalah buku yang berjudul *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Colin Gordon pada tahun 1980 dengan penerbit Pantheon Books. Sumber pendukung kedua adalah buku yang berjudul *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik dan*

⁵⁷ Paul Oliver, *Foucault The Key Ideas*, US: McGraw-Hill Companies, Inc., 2010, hlm. 12.

What It Is All About adalah karya B. Herry-Priyono yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan penerbit Kompas. Sumber pendukung ketiga adalah buku yang berjudul *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad Ke-21* adalah karya Budiono Kusumohamidjojo yang diterbitkan pada tahun 2014 dengan penerbit Jalasutra.

Penulis juga memakai sumber data dari media internet, yaitu artikel-artikel berita sebagai bahan untuk relevansi pemikiran Michel Foucault tentang politik sebagai strategi kekuasaan terhadap dunia politik Indonesia di zaman ini. Artikel-artikel berita tersebut dipilih oleh penulis yang membahas tentang fenomena-fenomena dunia politik Indonesia agar penulis dapat memberikan informasi serta dapat menjelaskan keterkaitan antara pemikiran Foucault dengan politik di Indonesia.

1.4.2. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Metode interpretasi teks membantu penulis untuk semakin memahami gagasan politik sebagai strategi kekuasaan dari Michel Foucault secara tepat. Metode ini digunakan penulis dalam mempelajari sumber pustaka utama serta untuk sumber pustaka pendukung agar penulis dapat menemukan gagasan politik sebagai strategi kekuasaan melalui upaya penulis berdialog dengan karya Michel Foucault yang membahas soal kekuasaan.

2. Metode kesinambungan historis digunakan penulis untuk menyusun riwayat hidup tokoh, pengaruh yang diterimanya, dan karya-karyanya. Metode ini membantu untuk lebih memahami lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialami dalam perjalanan hidup tokoh. Hal tersebut bertujuan untuk melihat latar belakang eksternal maupun internal tokoh sehingga membentuk pemikirannya serta pengembangan pemikiran tokoh tersebut.
3. Metode deskripsi digunakan penulis dalam skripsi ini, di mana penulis hendak membuat suatu narasi penjelasan secara ringkas dari sumber primer tentang topik penulisan skripsi.
4. Metode analisis wacana kritis digunakan penulis, di mana penulis mengumpulkan beberapa artikel berita di internet dengan tema yang sama. Kemudian penulis akan melakukan perbandingan antar artikel berita. Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis terhadap artikel-artikel berita tersebut dengan memakai sudut pandang pemikiran Michel Foucault yang didapatkan penulis melalui metode interpretasi dari karya-karya Michel Foucault. Hal tersebut dilakukan terhadap sumber-sumber media artikel berita internet agar penulis memperoleh ketepatan pemahaman dan penjelasan terhadap artikel-artikel berita di internet untuk relevansinya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, (dari judul asli *Surveiller et punir: Naissance de la prison*), diterjemahkan oleh Alan Sheridan, New York: Vintage Books, 1977

Dalam skripsi ini, penulis hendak menggunakan dan menjadikan buku *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* sebagai sumber primer pertama. Buku ini adalah terjemahan dari karya Foucault pada tahun 1975 dengan judul *Surveiller et Punir: Naissance de la Prison*. Pada tahun 1977, buku *Discipline and Punish: The Birth of The Prison* diterbitkan. Dalam buku ini, Foucault menjelaskan mekanisme penjara dan disiplin mampu menjalankan kekuasaan tanpa pernah disadari serta dilihat oleh objek kekuasaan.⁵⁸ Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak dimiliki oleh individu, melainkan berfungsi sebagai kekuatan yang meresap ke seluruh lapisan masyarakat.⁵⁹ Dia memperkenalkan konsep kekuasaan disipliner yang melakukan kontrol terhadap individu melalui pengawasan, regulasi, dan normalisasi sehingga kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif membentuk perilaku sesuai dengan norma dan harapan masyarakat atau dapat dipahami menghasilkan “badan yang patuh” terhadap tuntutan kekuasaan.⁶⁰ Dalam analisisnya terhadap disiplin, Foucault,

⁵⁸ Bdk., Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, (dari judul asli *Surveiller et punir: Naissance de la prison*), diterjemahkan oleh Alan Sheridan, New York: Vintage Books, 1977, hlm. 170-171.

⁵⁹ *Ibid.* hlm 138.

⁶⁰ “Discipline increases the forces of the body (in economic terms of utility) and diminishes these same forces (in political terms of obedience). In short, it dissociates power from the body; on the one hand, it turns it into an 'aptitude', a capacity', which it seeks to increase; on the other hand, it reverses the course of the energy, the power that might result from it, and turns it into a relation of strict subjection.” (*Ibid.*)

menunjukkan keterkaitan erat antara pelaksanaan mekanisme kuasa dan kelahiran pengetahuan atas individu. Disiplin merupakan strategi pelaksanaan kuasa yang terarah pada pelatihan individu sehingga melahirkan masyarakat yang disiplin dan hal tersebut dilakukan dengan sistem panoptisisme, yang dapat menyentuh setiap elemen masyarakat secara mendetail.⁶¹ Maka buku ini, memperlihatkan bagaimana kekuasaan membentuk individu-individu dan juga proses internalisasi kekuasaan ini dilakukan melalui teknik normalisasi melalui mekanisme panoptikon.⁶² Pada akhir buku ini, Foucault mengatakan bahwa kekuatan normalisasi mampu menjadi pembentuk pengetahuan dalam masyarakat modern dan kekuasaan juga beroperasi melalui mekanisme-mekanisme sosial yang dibangun untuk kesejahteraan.⁶³ Buku ini merupakan aktualisasi dari konsep “biopower” dari bagian kelima buku *The History of Sexuality Volume I: An Introduction* melalui pengontrolan individu di dalam penjara.

**1.5.2. Michel Foucault, *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*,
(dari judul asli *Histoire de la Sexualite I: La Volonte de savoir*),
diterjemahkan oleh Robert Hurley, New York: Pantheon Books, 1978**

Sumber primer kedua adalah buku *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*. Buku tersebut merupakan buku terjemahan dari buku Michel

⁶¹ “There are two images, then, of discipline. At one extreme, the discipline-blockade, the enclosed institution, established on the edges of society, turned inwards towards negative functions: arresting evil, breaking communications, suspending time. At the other extreme, with panopticism, is the discipline-mechanism: a functional mechanism that must improve the exercise of power by making it lighter, more rapid, more effective, a design of subtle coercion for a society to come.” (Ibid., hlm. 209.)

⁶² Ibid., hlm. 170-216.

⁶³ Ibid., hlm. 308.

Foucault yang berjudul *Histoire de la sexualite I: La Volonte de savoir*. Buku ini menjelaskan bahwa kekuasaan yang berdaulat memiliki kekhasan, yaitu menentukan atau memutuskan hidup dan mati seseorang.⁶⁴ Dalam perkembangannya telah terjadi transformasi dari mekanisme kekuasaan, di mana kekuasaan bekerja untuk menghasut, memperkuat, mengendalikan, dan mengatur kekuatan-kekuatan yang berada di bawahnya serta menormalisasi tindakan kontrol.⁶⁵ Bagian kelima yang berjudul “*Right of Death and Power Over Life*” mengacu pada analisis Foucault tentang bagaimana kekuasaan beroperasi tidak hanya melalui pengaturan dan pengendalian kehidupan, tetapi juga melalui kewenangan untuk mendikte siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati, di mana konsep ini memperlihatkan cara kekuasaan dijalankan melalui mekanisme seperti hukuman, disiplin, dan norma sosial.⁶⁶ Mekanisme kekuasaan ini melakukan kontrol terhadap individu dengan mengatur dan mengendalikan tubuh serta perilaku masyarakat. Foucault menuliskan istilah “biopower” untuk menggambarkan bentuk kekuasaan yang berkaitan dengan mengelola populasi, memastikan kelangsungan hidup dan produktivitas masyarakat.⁶⁷ Foucault berpendapat bahwa masyarakat modern telah ditandai dengan pergeseran

⁶⁴ “It was no longer considered that this power of the sovereign over his subjects could be exercised in an absolute and unconditional way, but only in cases where the sovereign's very existence was in jeopardy: a sort of right of rejoinder. If he were threatened by external enemies who sought to overthrow him or contest his rights, he could then legitimately wage war, and require his subjects to take part in the defense of the state; without “directly proposing their death,” he was empowered to “expose their life”: in this sense, he wielded an “indirect” power over them of life and death.” (Michel Foucault, *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*, (dari judul asli *Histoire de la sexualite I: La Volonte de savoir*), diterjemahkan oleh Robert Hurley New York: Pantheon Books, 1978, hlm 135.)

⁶⁵ *Ibid.* hlm 137.

⁶⁶ *Ibid.* hlm 140.

⁶⁷ Michel Foucault, *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*, (dari judul asli *Histoire de la sexualite I: La Volonte de savoir*), diterjemahkan oleh Robert Hurley, New York: Pantheon Books, 1978, hlm. 140-142.

dinamika kekuasaan menuju “biopower”, di mana pengaturan kehidupan menjadi semakin penting untuk menjaga ketertiban sosial yang berupaya memahami dan mengendalikan perilaku manusia guna memproduksi masyarakat yang “taat”.⁶⁸ Maka pada buku ini, konsepsi strategi kekuasaan telah dijalankan dan mengontrol hingga pada tingkat kehidupan. Dalam hal ini kekuatan politik dapat menjadi sarana yang mendukung konsep pengontrolan ini.

1.5.3. Michel Foucault, *Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, diterjemahkan oleh Colin Gordon, New York: Pantheon Books, 1980

Buku *Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* diterjemahkan oleh Colin Gordon dan diterbitkan pada tahun 1980. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dan wawancara oleh Michel Foucault antara tahun 1972 hingga 1977. Buku ini menampilkan pemikiran-pemikirannya yang berkembang selama periode tersebut. Buku ini merangkum salah satu tema sentral Foucault, yaitu hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Dalam buku ini, Foucault mengeksplorasi bagaimana kekuasaan beroperasi melalui produksi dan penyebaran pengetahuan serta bagaimana pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan.⁶⁹ Dalam bab 3 berjudul *body/power*, Foucault menjelaskan tentang tubuh dan relasi kekuasaan, di mana ia menyinggung soal

⁶⁸ “I do not mean to say that the law fades into the background or that the institutions of justice tend to disappear, but rather that the law operates more and more as a norm, and that the judicial institution is increasingly incorporated into a continuum of apparatuses (medical, administrative, and so on) whose functions are for the most part regulatory. A normalizing society is the historical outcome of a technology of power centered on life.” (Ibid, hlm. 144.)

⁶⁹ Michel Foucault, *Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, diterjemahkan oleh Colin Gordon, New York: Pantheon Books, 1980, *Preface*.

tubuh sebagai realitas politik digunakan untuk mengontrol dan mengatur tubuh individu.⁷⁰ Kemudian pada bab 7 berjudul *power and strategies*, Foucault menguraikan aspek struktural dan implikasi karya-karyanya terhadap perjuangan politik sehari-hari.⁷¹ Foucault menganalisis cara kekuasaan bekerja dalam masyarakat modern dan bagaimana strategi-strategi digunakan untuk mempertahankan, memperkuat, atau mengubahnya. Hal itu didasarkan pada kekuasaan itu tidak hanya bersifat represif yang memiliki arti melarang atau membatasi untuk mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan melalui strategi-strategi kekuasaan yang terjalin dengan relasi-relasi dalam masyarakat agar terkondisikan.⁷² Upaya-upaya seperti inilah yang dinamakan strategi kekuasaan dalam pemikiran Foucault.

1.5.4. B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik dan What It Is All About*, Jakarta: Kompas, 2022

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 60.

⁷¹ “It seems to me that this whole intimidation with the body of reform is linked to the lack of a strategic analysis appropriate to political struggle, to struggles in the field of political power. The role for theory today seems to me to be just this: not to formulate the global systematic theory which holds everything in place, but to analyse the specificity of mechanisms of power, to locate the connections and extensions, to build little by little a strategic knowledge (*savoir*).” (*Ibid.*, hlm. 145.)

⁷² “I would suggest rather (but these are hypotheses which will need exploring) : (i) that power is co-extensive with the social body; there are no spaces of primal liberty between the meshes of its network ; (ii) that relations of power are interwoven with other kinds of relations (production, kinship, family, sexuality) for which they play at once a conditioning and a conditioned role ; (iii) that these relations don 't take the sole form of prohibition and punishment, but are of multiple forms; (iv) that their interconnections delineate general conditions of domination, and this domination is organised into a more-or-less coherent and unitary strategic form ; that dispersed, heteromorphous, localised procedures of power are adapted, re-inforced and transformed by these global strategies, all this being accompanied by numerous phenomena of inertia, displacement and resistance ; hence one should not assume a massive and primal condition of domination, a binary structure with 'dominators' on one side and 'dominated' on the other, but rather a multiform production of relations of domination which are partially susceptible of integration into overall strategies...” (*Ibid.*)

Buku *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik dan What It Is All About* adalah karya B. Herry-Priyono, yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh penerbit Kompas. Buku ini membahas tentang pemikiran politik dari para filsuf sejak zaman Yunani Kuno hingga pada masa saat ini, di mana buku ini memberikan suatu pemahaman mendasar ciri politik horizontal pada masa Yunani Kuno, ciri politik vertikal pada masa Romawi sampai masa Modern, dan ciri politik gabungan (horizontal-vertikal) pada masa saat ini.⁷³ Selain itu, buku ini juga mengambil pendekatan secara tematik, yang membuat filsafat politik dibahas secara lebih mendalam, khususnya buku ini menunjukkan kekuasaan sebagai elemen utama dari filsafat politik yang mencakup tentang negara, otoritas negara, warga negara, demokrasi, dan keadilan.⁷⁴ Buku ini juga memberikan suatu ilustrasi bahwa kekuasaan dalam kehidupan politik merupakan suatu relasi yang terjadi antar negara-warga-dan kekuatan lainnya, yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

1.5.5. Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad Ke-21*, Yogyakarta: Jalasutra, 2014

Buku *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad Ke-21* adalah karya Budiono Kusumohamidjojo, yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh penerbit Jalasutra. Buku ini membuka pembahasan yang saling berkaitan dengan pengertian antara “filsafat”, “politik”, dan “filsafat politik”, yang selalu berpusat

⁷³ B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik dan What It Is All About*, Jakarta: Kompas, 2022, hlm. 2 – 5.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 251 - 255.

pada persoalan manusia sebagai pelaku politik.⁷⁵ Manusia selalu hidup dalam kehidupan bersama menjadi urusan utama politik sehingga penyelenggaraan kehidupan bersama itu terkait dengan penggunaan kekuasaan.⁷⁶ Pada akhirnya, politik merupakan urusan mengatur kepentingan banyak orang dan perilakunya sehingga politik melibatkan kekuasaan yang diperlukan untuk dapat berfungsi dalam mencapai tujuan bersama.⁷⁷ Karena kekuasaan merupakan instrument manusia yang digunakan dalam menjalankan politik dibahas dalam bab yang berjudul “Hakikat dan Wajah Kekuasaan”.⁷⁸

1.6. Skema Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bagian berdasarkan Bab, yaitu Bab I berjudul pendahuluan terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan Pustaka, dan skema penulisan. Bab II berjudul filsafat politik dan kajian tentang kekuasaan berisikan penjelasan tentang filsafat politik dan juga gagasan tentang kekuasaan berdasarkan pandangan filsafat politik secara umum. Bab III berjudul Pemikiran Politik Michel Foucault. Bab tersebut akan dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama membahas latar belakang kehidupan dan karya Michel Foucault serta tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikirannya dan bagian kedua berisikan pemikiran politik Michel Foucault tentang kekuasaan, hubungan kekuasaan, pengetahuan dan wacana, yang kemudian membahas mekanisme kekuasaan mulai dari konsep

⁷⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad Ke-21*, Yogyakarta: Jalasutra, 2014, hlm. xvi.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. xvii.

⁷⁸ *Ibid.*

mengenai disiplin sebagai upaya kontrol terhadap individu menuju pada konsep “biopower” sebagai upaya kontrol terhadap kehidupan manusia secara populasi melalui wacana seksualitas dan regulasi. Kemudian, penjelasan ini akan mengarah kepada politik sebagai strategi kekuasaan di dalam masyarakat dengan kunci pada konsep pemerintahan. Bab IV berjudul analisis terhadap pemikiran politik sebagai strategi kekuasaan dan relevansinya akan dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian pertama berisikan tentang penjelasan analisis kritis politik sebagai strategi kekuasaan menurut Michel Foucault dengan pisau analisis filsafat politik, bagian kedua berisikan tentang relevansi pemikiran Michel Foucault terhadap politik di Indonesia pada masa kini, bagian ketiga berisikan tinjauan kritis terhadap pemikiran politik Foucault. Bab V berjudul penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.